



DINAMIKA GOVERNANCE JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA

<http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/index>

PERSPEKTIF GENDER TERHADAP UNMET NEED DALAM MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP DI KOTA SERANG

Dwi Nurwahyuni ¹, Riswanda ², Ipah Ema Jumiati ³

¹²³Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

*Email Corresponding: 7775230019@untirta.ac.id

ARTICLE INFORMATION ABSTRACT

Article history:

Received date: 20 Januari 2025

Revised date: 18 Februari 2025

Accepted date: 1 Maret 2025

The gap between needs and utilization of family planning (KB) services, known as unmet need, is a major challenge in improving community welfare, especially in Serang City. Various factors influence this condition, one of which is the dynamics of gender relations in the family and society which have an impact on the decision to use contraception. A gender perspective is key in understanding the root of the problem of unmet need, considering that access to information, freedom in decision making, and social norms are influenced by gender roles. Therefore, this research aims to evaluate how gender perspectives influence unmet need in family planning programs and their impact on the quality of life of people in Serang City. This research uses a qualitative approach by conducting in-depth interviews with couples of childbearing age (PUS) and analyzing secondary data from various health surveys. The research results reveal that limited access to information regarding contraception, lack of involvement of husbands in decision making, and social norms limiting women's role in choosing appropriate family planning methods are factors that contribute to the high rate of unmet need. Apart from that, economic and cultural barriers are also challenges that worsen this condition. The conclusion of this research confirms that implementing a gender-based approach in family planning programs is very important to reduce unmet need and improve people's quality of life. By ensuring access to family planning information and services, and encouraging men's active participation in decision making, family planning programs can run more effectively. Therefore, policies that consider gender aspects will not only increase the success rate of family planning programs, but also contribute to the welfare of families and society at large.

Keyword: gender, unmet need, family planning, quality of life, Serang City

ABSTRAKSI

Kesenjangan antara kebutuhan dan pemanfaatan layanan keluarga berencana (KB), yang dikenal sebagai *unmet need*, menjadi tantangan utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kota Serang. Berbagai faktor memengaruhi kondisi ini, salah satunya adalah dinamika relasi gender dalam keluarga dan masyarakat yang berdampak pada keputusan penggunaan kontrasepsi. Perspektif gender merupakan kunci dalam memahami akar permasalahan *unmet need*, mengingat akses terhadap informasi, kebebasan dalam pengambilan keputusan, serta norma sosial dipengaruhi oleh peran gender. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana perspektif gender memengaruhi *unmet need* dalam program KB dan dampaknya terhadap kualitas hidup masyarakat di Kota Serang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam terhadap pasangan usia subur (PUS) serta menganalisis data sekunder dari berbagai survei kesehatan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa keterbatasan akses informasi mengenai kontrasepsi, kurangnya keterlibatan suami dalam pengambilan keputusan,

serta norma sosial membatasi peran perempuan dalam memilih metode KB yang sesuai merupakan faktor yang berkontribusi terhadap tingginya angka *unmet need*. Selain itu, hambatan ekonomi dan budaya juga menjadi tantangan yang memperburuk kondisi ini. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa penerapan pendekatan berbasis gender dalam program KB sangat penting untuk mengurangi *unmet need* serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan memastikan akses terhadap informasi dan layanan KB, serta mendorong partisipasi aktif laki-laki dalam pengambilan keputusan, program KB dapat berjalan lebih efektif. Oleh karena itu, kebijakan yang mempertimbangkan aspek gender tidak hanya akan meningkatkan tingkat keberhasilan program KB, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan keluarga dan masyarakat secara luas.

Kata Kunci: gender, *unmet need*, keluarga berencana, kualitas hidup, Kota Serang.

PENDAHULUAN

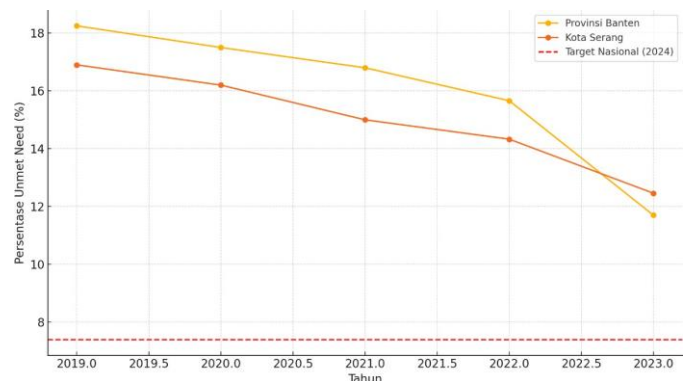
Keluarga Berencana (KB) merupakan suatu program pemerintah yang dirancang untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui jarak kelahiran dan jumlah anak. Menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak, dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas (Republik Indonesia, 2009).

Namun, dalam program KB terdapat suatu tantangan yakni fenomena *unmet need*, adalah kebutuhan yang tidak terpenuhi terhadap layanan KB. Menurut Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2020 tentang pelayanan Keluarga Berencana dan Pacsa Persalinan, *unmet need* merupakan pasangan usia subur yang tidak ingin memiliki anak lagi atau yang ingin menjarangkan kelahiran tetapi tidak menggunakan kontrasepsi (BKKBN, 2020).

Unmet need ini mengacu pada kondisi ketika pasangan usia subur (PUS) tidak menggunakan metode kontrasepsi meskipun memiliki keinginan untuk menunda atau menghentikan kehamilan. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara keinginan dan praktik penggunaan kontrasepsi, yang sering kali diakibatkan oleh berbagai faktor kompleks, termasuk keterbatasan akses terhadap layanan KB, kurangnya informasi, dan pengaruh norma sosial. *Unmet need* dalam program KB menjadi salah satu indikator penting untuk menilai keberhasilan layanan kesehatan reproduksi.

Unmet need menjadi salah satu isu strategis terkait layanan dasar yang harus diturunkan. Berdasarkan Laporan Kinerja Perwakilan BKKBN Provinsi Banten, diketahui bahwa angka *Unmet need* Provinsi Banten tahun 2022 sebesar 15,66% dan mengalami penurunan pada tahun 2023 sebesar 11,7% (Perwakilan BKKBN Provinsi Banten, 2023). Laporan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kota Serang, angka *Unmet need* tahun 2022 sebesar 14,33% dan mengalami penurunan di tahun 2023 menjadi sebesar 12,46% (DP3AKB Kota Serang, 2023). Namun, dalam Rencana Strategis (Renstra) BKKBN 2020-2024, angka *Unmet need* ditargetkan sebesar 7,4% pada tahun 2024 (BKKBN RI, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa angka *Unmet need* di Kota Serang masih cukup tinggi, artinya Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin menjarangkan kelahiran tetapi tidak memakai kontrasepsi jumlahnya masih banyak di Kota Serang. Berikut grafik *Unmet need* di Provinsi Banten dan Kota Serang tahun 2019-2023:

Grafik 1. Trend *Unmet need* 2019-2023



Di Kota Serang, angka *unmet need* tergolong masih relatif tinggi apabila dibandingkan Kota lain di Provinsi Banten, yang berdampak pada angka kelahiran yang tidak direncanakan, peningkatan

risiko kesehatan reproduksi, dan menurunnya kualitas hidup keluarga secara keseluruhan. Tingginya angka ini memiliki implikasi serius terhadap kesehatan reproduksi, kesejahteraan ekonomi, dan kualitas hidup.

Tingginya angka *unmet need* di Kota Serang menunjukkan adanya hambatan struktural dan budaya yang perlu diatasi. Selain masalah akses dan ketersediaan layanan KB, perspektif gender dalam keluarga dan masyarakat menjadi faktor yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan upaya menurunkan *unmet need*. Perspektif gender memengaruhi berbagai aspek, mulai dari distribusi informasi hingga pengambilan keputusan terkait penggunaan kontrasepsi.

Ketidaksetaraan gender sering kali menghambat perempuan dalam mendapatkan informasi dan layanan KB yang mereka butuhkan. Dalam banyak kasus, keputusan terkait KB didominasi oleh pihak laki-laki dalam keluarga, baik karena norma sosial yang menguatkan peran dominan laki-laki maupun kurangnya pemberdayaan perempuan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Hal ini menciptakan tantangan tambahan bagi perempuan dalam mengakses dan menggunakan metode KB yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Masih tingginya *Unmet need* di Kota Serang merupakan suatu isu yang sangat krusial apabila dilihat dari perspektif gender. Banyak pasangan yang memiliki hambatan dalam mengakses layanan keluarga berencana akibat persepsi tentang peran gender dalam pengambilan keputusan keluarga. Jakiyah & Amelda, (2023) melalui hasil penelitiannya di Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang menyatakan bahwa laki-laki memegang peranan penting sebagai kepala keluarga dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, anggapan bahwa pengambilan keputusan terkait penggunaan kontrasepsi sepenuhnya merupakan tanggung jawab wanita menciptakan ketimpangan dalam akses dan kesetaraan akan pentingnya perencanaan keluarga. Di kehidupan bermasyarakat, laki-laki cenderung memiliki pengaruh lebih besar dalam pengambilan keputusan keluarga tetapi keterlibatannya masih kurang dalam penggunaan KB. Sementara wanita dalam posisi terjebak stereotip gender merasa takut atau malu untuk mengutarakan kebutuhan terkait kontrasepsi. Hal ini mengakibatkan banyak PUS

yang memiliki kebutuhan KB tetapi tidak terpenuhi karena adanya hambatan budaya dan sosial yang menghambat akses terhadap layanan KB. Perspektif gender dalam kesehatan reproduksi ini menyoroti bagaimana relasi antara laki-laki dan perempuan memengaruhi akses, penggunaan, dan keputusan terkait kontrasepsi. Ketidaksetaraan gender, seperti dominasi laki-laki dalam pengambilan keputusan dan stereotip peran perempuan, menjadi penghambat dalam memenuhi kebutuhan KB

Mengatasi *unmet need* melalui pendekatan yang mempertimbangkan perspektif gender tidak hanya akan meningkatkan partisipasi KB, tetapi juga memberikan dampak positif yang luas terhadap kesehatan reproduksi, kesejahteraan keluarga, dan pembangunan sosial-ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada hubungan antara perspektif gender dan *unmet need* di Kota Serang, serta bagaimana strategi berbasis gender dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan PUS yang mengalami *unmet need* di Kota Serang. Pemilihan informan dilakukan secara purposif untuk memastikan keberagaman latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya. Data sekunder diperoleh dari laporan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Serang dan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI). Analisis data dilakukan menggunakan metode tematik untuk mengidentifikasi pola-pola terkait perspektif gender dan *unmet need*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor gender memiliki peran signifikan dalam menentukan tingkat *unmet need* di Kota Serang. Beberapa temuan utama adalah:

Akses Informasi dan Edukasi

Masalah kurangnya akses informasi yang memadai terkait metode kontrasepsi di Kota Serang merupakan tantangan signifikan dalam upaya meningkatkan partisipasi dalam program Keluarga Berencana (KB). Faktor sosial budaya yang

memperkuat stigma terhadap kontrasepsi dan norma yang menganggap pembicaraan mengenai kontrasepsi sebagai hal tabu semakin memperparah keadaan. Hal ini menyebabkan perempuan, terutama yang sudah menikah, merasa tertekan oleh ekspektasi sosial, sehingga mereka enggan membahas atau menggunakan kontrasepsi meskipun memiliki kebutuhan. Hal ini juga diungkapkan oleh Okenyuru et al., (2023) bahwa faktor budaya seperti mitos dan kesalahpahaman, perspektif gender, dan dinamika pengambilan keputusan secara signifikan mempengaruhi penggunaan kontrasepsi di Kabupaten Turkana. Norma-norma sosial budaya ini menciptakan stigma dan mencegah diskusi terbuka tentang kontrasepsi, memperburuk tantangan dalam mengadopsi metode keluarga berencana modern

Beberapa informan yang diwawancarai menyatakan bahwa mereka merasa takut atau khawatir terhadap penilaian negatif dari lingkungan sekitar jika diketahui menggunakan kontrasepsi. Stigma ini tidak hanya terbatas pada perempuan dewasa, tetapi juga pada remaja perempuan yang membutuhkan edukasi tentang kesehatan reproduksi sejak dini. Sayangnya, tingkat literasi mengenai kesehatan reproduksi masih rendah, terutama di kalangan remaja perempuan. Hal ini menciptakan kesenjangan informasi yang memperburuk *unmet need* atau kebutuhan yang tidak terpenuhi akan alat kontrasepsi. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Harper (2024) menyatakan bahwa literasi kesehatan reproduksi secara signifikan mempengaruhi kesenjangan informasi yang mengarah pada kebutuhan yang tidak terpenuhi dalam keluarga berencana dan kesehatan ibu. Kurangnya literasi dan akses ke informasi dapat menghambat kemampuan perempuan untuk membuat pilihan reproduksi berdasarkan informasi, yang mengakibatkan hasil kesehatan yang merugikan.

Kesenjangan informasi ini juga diperparah oleh minimnya penggunaan media komunikasi yang inovatif oleh pemerintah dan lembaga terkait untuk menyampaikan pesan kesehatan reproduksi secara efektif. Media sosial, yang sebenarnya memiliki potensi besar sebagai alat komunikasi modern, belum dimanfaatkan secara maksimal untuk menyebarkan informasi yang akurat dan menarik tentang program KB. Padahal, media sosial dapat menjadi sarana yang efektif untuk menjangkau

berbagai kelompok masyarakat, termasuk remaja dan perempuan dewasa.

Media sosial memiliki potensi yang signifikan untuk meningkatkan penyebaran informasi akurat mengenai program pengendalian kelahiran, namun tetap kurang dimanfaatkan. Penelitian menunjukkan bahwa sementara sebagian besar konten yang dibagikan di platform seperti Facebook dan YouTube akurat, informasi yang salah tetap ada, sering disebarkan oleh profesional kesehatan itu sendiri. Ini menyoroti perlunya pendekatan strategis untuk memanfaatkan media sosial secara efektif untuk pendidikan kesehatan masyarakat (Abuduxike et al., 2023). Setianti et al., (2017) juga menyatakan media sosial kurang dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi akurat tentang program pengendalian kelahiran, terlepas dari potensinya. Remaja sering beralih ke media sosial untuk informasi kesehatan reproduksi karena tabu orang tua, menyoroti perlunya strategi komunikasi yang efektif di bidang ini.

Pengambilan Keputusan

Keputusan terkait penggunaan alat kontrasepsi di banyak keluarga di Kota Serang sering kali bukan merupakan hasil diskusi bersama, melainkan didominasi oleh suami. Pola pengambilan keputusan yang patriarkal ini menjadi salah satu hambatan utama dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam program Keluarga Berencana (KB). Beberapa informan mengungkapkan bahwa suami cenderung menolak penggunaan KB dengan alasan yang beragam, mulai dari kurangnya pemahaman, mitos yang berkembang di masyarakat, hingga ketakutan terhadap efek samping yang dianggap dapat membahayakan kesehatan istri atau memengaruhi keharmonisan rumah tangga.

Mitos yang beredar terkait penggunaan kontrasepsi, seperti anggapan bahwa alat kontrasepsi dapat menyebabkan infertilitas permanen, menurunkan gairah seksual, atau bahkan membahayakan nyawa, menjadi salah satu faktor yang memperparah penolakan ini. Suami yang kurang mendapatkan informasi yang benar tentang manfaat dan risiko alat kontrasepsi sering kali menjadi penghalang bagi perempuan yang ingin menggunakan KB. Dalam situasi seperti ini, perempuan tidak hanya menghadapi stigma sosial,

tetapi juga keterbatasan dalam mengontrol keputusan terkait kesehatan reproduksi mereka sendiri. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Joseph et al., 2024) bahwa mitos seperti keyakinan bahwa kontrasepsi menyebabkan infertilitas permanen, mengurangi gairah seksual, atau menimbulkan risiko yang mengancam jiwa secara signifikan berkontribusi pada keengganan dalam menggunakan pil kontrasepsi oral, yang berasal dari informasi yang salah dan kurangnya komunikasi yang tepat tentang efeknya.

Ketakutan terhadap efek samping juga menjadi isu yang cukup dominan. Banyak suami khawatir bahwa kontrasepsi hormonal, seperti pil KB atau suntik KB, dapat menimbulkan masalah kesehatan pada istri mereka, seperti kenaikan berat badan, gangguan hormonal, atau perubahan suasana hati. Padahal, sebagian besar efek samping ini bersifat sementara dan dapat diminimalkan dengan konsultasi medis yang tepat. Sayangnya, minimnya akses ke layanan kesehatan yang ramah dan informasi yang kredibel membuat banyak pasangan tetap terjebak dalam ketakutan yang tidak berdasar.

Untuk mengatasi persoalan ini, pendekatan berbasis edukasi harus dilakukan tidak hanya kepada perempuan, tetapi juga kepada laki-laki sebagai bagian dari program KB. Kampanye yang melibatkan pasangan suami-istri secara bersamaan dapat membantu meningkatkan pemahaman kedua belah pihak tentang pentingnya perencanaan keluarga dan pilihan kontrasepsi yang tersedia. Pendekatan ini juga dapat mendorong komunikasi yang lebih baik antara pasangan terkait kesehatan reproduksi, sehingga keputusan mengenai KB dapat diambil secara bersama-sama dan berdasarkan informasi yang tepat. Aventin et al., (2023) menyatakan bahwa intervensi keluarga berencana yang melibatkan pria dan wanita menyebabkan tingginya penggunaan alat kontrasepsi dan tingkat keberlanjutan yang lebih tinggi dibandingkan dengan intervensi khusus wanita saja. Hasil penelitian Sundoro et al., (2023) juga menyatakan bahwa partisipasi laki-laki, terutama sebagai kepala keluarga, sangat penting untuk keluarga berencana yang efektif. Dengan meningkatkan pemahaman pria tentang metode kontrasepsi, seperti Metode Operasi Pria (MOP), dan mengatasi mitos dan fakta, program ini bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan dan dukungan mereka untuk inisiatif

keluarga berencana, yang pada akhirnya mengarah pada hasil kesehatan reproduksi yang lebih baik bagi keluarga.

Selain itu, pelibatan tokoh masyarakat, seperti pemuka agama dan tokoh adat, dapat membantu menghilangkan mitos dan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada laki-laki mengenai manfaat kontrasepsi bagi kesejahteraan keluarga. Dengan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan suami tidak lagi menjadi penghalang, tetapi justru menjadi mitra yang mendukung perempuan dalam mengakses layanan KB. Upaya ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih mendukung untuk pengambilan keputusan yang inklusif dan berbasis kesetaraan gender. Keterlibatan tokoh masyarakat, khususnya pemimpin agama dan adat, memainkan peran penting dalam meningkatkan pemahaman dan penerimaan kontrasepsi untuk kesejahteraan keluarga. Para pemimpin ini dapat secara efektif menghilangkan mitos seputar penggunaan kontrasepsi dan mempromosikan manfaatnya dalam komunitas mereka. Mwakisole et al., (2023) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa para pemimpin agama berfungsi sebagai tokoh tepercaya, secara signifikan mempengaruhi sikap masyarakat terhadap keluarga berencana. Dukungan mereka dapat menyebabkan peningkatan penggunaan kontrasepsi, sebagaimana dibuktikan oleh sebuah penelitian di Tanzania di mana intervensi pendidikan untuk para pemimpin agama menghasilkan peningkatan 47% dalam penggunaan kontrasepsi

Norma Gender

Norma-norma tradisional yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang sepenuhnya bertanggung jawab atas kesehatan reproduksi seringkali meningkatkan beban yang mereka tanggung, terutama dalam menghadapi *unmet need* atau kebutuhan yang belum terpenuhi terkait layanan keluarga berencana (KB). Pada banyak komunitas di Indonesia, termasuk di Kota Serang, masih berlaku pandangan yang menganggap bahwa peran perempuan dalam hal reproduksi adalah tugas utama mereka. Hal ini menyebabkan perempuan seringkali merasa tertekan untuk memenuhi ekspektasi sosial tersebut, yang pada gilirannya memperburuk akses mereka terhadap

layanan KB yang dapat memenuhi kebutuhan kesehatan reproduksi mereka.

Norma gender tradisional ini tidak hanya membebani perempuan secara psikologis, tetapi juga menjadi penghalang nyata dalam akses mereka terhadap layanan kesehatan, termasuk penggunaan kontrasepsi yang tepat. Di beberapa kecamatan di Kota Serang, seperti Kasemen dan Curug, pengambilan keputusan terkait penggunaan kontrasepsi masih dominan di tangan suami. Berdasarkan data yang ada, sekitar 65% keputusan mengenai kontrasepsi di daerah tersebut ditentukan oleh suami, bukan oleh perempuan itu sendiri. Padahal, keputusan mengenai kesehatan reproduksi adalah hal yang sangat pribadi dan harus didasarkan pada kebutuhan serta kenyamanan perempuan.

Dari hasil wawancara kepada informan didapatkan informasi bahwa banyak perempuan merasa bahwa mereka tidak memiliki otonomi penuh dalam memilih metode kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi dan preferensi mereka. Beberapa dari mereka bahkan merasa terpaksa mengikuti keputusan suami, meskipun metode yang dipilih tidak sesuai dengan kebutuhan kesehatan mereka. Hal ini memperburuk ketimpangan gender yang ada, di mana perempuan diposisikan sebagai pihak yang lebih pasif dalam pengambilan keputusan yang seharusnya melibatkan hak dan kebutuhan mereka.

Ketergantungan perempuan pada keputusan suami dalam hal kontrasepsi menunjukkan masih kuatnya norma patriarkal yang mendominasi kehidupan rumah tangga di beberapa wilayah. Keadaan ini juga dipengaruhi oleh faktor budaya dan sosial yang membatasi ruang bagi perempuan untuk mengungkapkan pilihan mereka. Di banyak daerah, ada anggapan bahwa suami sebagai kepala keluarga memiliki kewenangan penuh dalam berbagai keputusan, termasuk yang berkaitan dengan kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Hal ini seringkali membuat perempuan merasa tidak berdaya atau bahkan tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk membuat keputusan yang tepat mengenai penggunaan kontrasepsi. Gagasan suami sebagai kepala keluarga, yang memiliki otoritas penuh atas keputusan yang berkaitan dengan kesehatan dan kesejahteraan, berakar kuat dalam berbagai konteks budaya dan agama. Struktur patriarki ini sering menempatkan laki-laki sebagai

pengambil keputusan utama, yang dapat mengarah pada hasil positif dan negatif untuk dinamika keluarga. Eva & Habib dan Md. Ahsan (2024) mengemukakan bahwa norma patriarki memposisikan suami sebagai pengambil keputusan utama dalam masalah keluarga, termasuk kesehatan reproduksi, yang menyebabkan otonomi perempuan dibatasi secara signifikan. Dinamika ini memperkuat peran gender tradisional, di mana pendapat perempuan sering diremehkan dalam proses pengambilan keputusan.

Selain itu, minimnya informasi yang tersedia mengenai berbagai metode KB dan bagaimana cara mengaksesnya juga berkontribusi pada masalah ini. Banyak perempuan tidak mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi yang memadai, baik di tingkat keluarga, masyarakat, maupun melalui layanan kesehatan formal. Akibatnya, mereka seringkali tidak tahu pilihan yang tersedia, dan lebih memilih metode kontrasepsi yang disarankan oleh suami atau keluarga, meskipun belum tentu metode tersebut paling sesuai dengan kondisi mereka.

Oleh karena itu, penting untuk mengubah pandangan sosial yang membatasi peran perempuan dalam pengambilan keputusan mengenai kesehatan reproduksi mereka. Pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis kesetaraan gender sangat dibutuhkan, agar perempuan dapat lebih aktif terlibat dalam memilih metode KB yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Edukasi yang lebih luas mengenai hak-hak kesehatan reproduksi perempuan dan pentingnya peran mereka dalam pengambilan keputusan terkait kontrasepsi harus diberikan, baik melalui program-program pemerintah maupun inisiatif berbasis masyarakat yang memperkuat posisi perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Studi dari Damtew & Fantaye, (2024) menyatakan bahwa 59% wanita secara independen memutuskan penggunaan kontrasepsi, menunjukkan perlunya peningkatan dukungan dan pemberdayaan untuk semua wanita, terutama 6,06% yang tidak memiliki suara, untuk meningkatkan kesetaraan gender dalam pengambilan keputusan kontrasepsi.

Dampak terhadap Kualitas Hidup

Tingginya angka *unmet need* di Kota Serang memiliki dampak langsung terhadap kualitas hidup perempuan dan keluarganya. Ketika kebutuhan akan kontrasepsi tidak terpenuhi, perempuan menjadi

lebih rentan terhadap kehamilan yang tidak direncanakan. Hal ini dapat memicu tekanan fisik, psikologis, dan sosial yang signifikan, terutama bagi mereka yang sudah memiliki anak atau berada dalam kondisi ekonomi yang sulit. Informan dalam studi ini mengungkapkan bahwa kehamilan tidak direncanakan dapat membawa beban ekonomi yang berat, seperti meningkatnya pengeluaran untuk kebutuhan anak, perawatan kesehatan, dan pendidikan, yang tidak selalu dapat mereka tanggung.

Kurangnya akses terhadap kontrasepsi modern juga meningkatkan risiko kesehatan perempuan, terutama yang berkaitan dengan komplikasi kehamilan dan kelahiran. Perempuan yang mengalami kehamilan berulang dalam waktu dekat tanpa jeda yang cukup cenderung lebih rentan terhadap masalah kesehatan, seperti anemia, hipertensi, hingga komplikasi serius selama persalinan. Kondisi ini tidak hanya membahayakan kesehatan ibu, tetapi juga meningkatkan risiko bayi lahir prematur, berat badan lahir rendah, atau bahkan kematian ibu dan anak. Situasi ini semakin diperparah oleh keterbatasan akses layanan kesehatan di daerah tertentu, sehingga perempuan tidak mendapatkan dukungan medis yang memadai.

Dampak *unmet need* juga meluas pada kesejahteraan anak-anak dalam keluarga. Ketika kehamilan tidak direncanakan terjadi, orang tua sering menghadapi tantangan dalam menyediakan kebutuhan dasar seperti makanan bergizi, akses pendidikan yang layak, dan lingkungan tumbuh kembang yang sehat. Anak-anak dari keluarga dengan banyak anak cenderung memiliki risiko lebih tinggi mengalami kekurangan gizi yang dapat menjadikan anak stunting, putus sekolah, atau kurang mendapatkan perhatian yang memadai karena keterbatasan waktu dan sumber daya orang tua. Kondisi ini dapat menciptakan lingkaran kemiskinan yang sulit diputus, di mana kurangnya kesejahteraan anak berdampak pada masa depan keluarga secara keseluruhan. Data keluarga risiko stunting (KRS) di Kota Serang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Data KRS di Kota Serang Tahun 2024

No	Kecamatan	Keluarga Sasaran	KRS
1	Serang	38.999	5.367
2	Kasemen	18.227	4.132
3	Walantaka	19.966	2.814
4	Curug	11.427	705
5	Cipocok Jaya	18.972	2.134
6	Taktakan	22.595	3.269
	Total	130.186	18.421

Sumber : (BKKBN, 2024)

Tabel 2. Indikator Kemiskinan Kota Serang tahun 2021-2023

Indikator Kemiskinan	Tahun		
	2021	2022	2023
Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	47,91	42,56	44,99
% Penduduk Miskin	6,79	5,94	6,20
Garis Kemiskinan	431.210	570.368	511.575

Sumber : (BPS Kota Serang, 2024)

Berdasarkan kedua tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah keluarga risiko stunting di Kota Serang sebesar 18.421 keluarga dari jumlah sasaran yang ada sebanyak 130.186 keluarga. Jumlah penduduk miskin di Kota Serang relative meningkat dari tahun 2022 ke 2023 yakni sebanyak 42,56 ribu jiwa pada tahun 2022 (5,94%) dan sebanyak 44,99 ribu jiwa pada tahun 2023 (6,2%)

Selain hal tersebut, tekanan yang muncul akibat *unmet need* juga dapat memengaruhi hubungan antara pasangan. Ketidakharmonisan dalam rumah tangga sering kali dipicu oleh tekanan ekonomi dan kelelahan emosional yang dirasakan oleh perempuan akibat kehamilan berulang. Suami yang tidak memahami pentingnya perencanaan keluarga cenderung tidak memberikan dukungan emosional atau praktis, yang dapat memperburuk situasi. Dalam jangka panjang, kurangnya kesepakatan antara pasangan mengenai perencanaan keluarga dapat menurunkan kualitas hidup seluruh anggota keluarga.

Untuk mengatasi dampak negatif ini, pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan akses terhadap kontrasepsi modern serta memperluas program edukasi kesehatan reproduksi. Penyediaan layanan KB yang lebih ramah perempuan dan program penyuluhan yang melibatkan pasangan suami-istri dapat membantu memenuhi kebutuhan kontrasepsi sekaligus mengurangi angka *unmet need*. Dengan langkah-langkah strategis ini, diharapkan kualitas hidup perempuan dan keluarganya dapat meningkat secara signifikan, sehingga tercipta masyarakat yang lebih

sehat dan sejahtera. Meningkatkan layanan pengendalian kelahiran yang ramah wanita dan melibatkan pasangan yang sudah menikah dalam program penyuluhan dapat secara signifikan mengatasi kebutuhan kontrasepsi yang belum terpenuhi. Penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar wanita yang sudah menikah mengalami kebutuhan kontrasepsi yang tidak terpenuhi, seringkali karena kurangnya akses dan hambatan komunikasi. Studi dari Rajkumari et al., (2024) dan Tadesse et al., (2022) menunjukkan bahwa program kesadaran tentang keluarga berencana dan layanan yang tersedia dapat meningkatkan penggunaan kontrasepsi di antara wanita yang sudah menikah, berpotensi mengurangi kebutuhan yang tidak terpenuhi. Melibatkan pasangan dalam diskusi tentang keluarga berencana juga dapat berkontribusi positif untuk mengatasi kebutuhan layanan keluarga berencana.

KESIMPULAN

Perspektif gender sangat relevan dalam memahami dan mengatasi *unmet need* dalam pelaksanaan Program KB di Kota Serang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hambatan gender merupakan faktor utama yang memengaruhi *unmet need* di Kota Serang. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan intervensi berbasis gender yang meliputi:

1. Edukasi kesehatan reproduksi yang inklusif untuk perempuan dan laki-laki.
2. Kampanye kesadaran untuk mengurangi stigma sosial terhadap penggunaan kontrasepsi.
3. Peningkatan akses layanan KB melalui distribusi fasilitas kesehatan yang lebih merata.
4. Pelibatan laki-laki dalam program KB untuk mendorong pengambilan keputusan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abuduxike, G., Qawaf, M., Edwin, C., & Salaheldin, S. J. (2023). A Global Social Media Analysis of the Accuracy and Specific Characteristics of Information Shared about Family Planning and Contraception. *International Journal of Media and Networks*, 1(1), 40–49.
- Aventin, Á., Robinson, M., Hanratty, J., Keenan, C., Hamilton, J., McAteer, E. R., Tomlinson, M., Clarke, M., Okonofua, F., Bonell, C., & Lohan, M. (2023). Involving men and boys in family planning: A systematic review of the effective components and characteristics of complex interventions in low- and middle-income countries. *Campbell Systematic Reviews*, 19(1). <https://doi.org/10.1002/cl2.1296>
- BKKBN. (2020). Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Keluarga Berencana Pasca Persalinan. *Menteri Kesehatan Republik Indonesia Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia*, 69(555), 1–53.
- BKKBN. (2024). *Rekapitulasi keluarga berisiko stunting menurut wilayah*. 898. www.siga.bkkbn.go.id
- BKKBN RI. (2023). Rencana Strategis BKKBN 2020-2024. *BKKBN*, 1–84. https://bappeda.jogjaprovo.go.id/dataku/data_dasar/chart/3229
- BPS Kota Serang. (2024). *Indikator Kemiskinan Kota Serang Tahun 2021-2023*. <https://serangkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/OTAjMg==/indikator-kemiskinan.html>
- Damtew, S. A., & Fantaye, F. T. (2024). Women alone modern contraceptive use decision making and its correlates, evidence from PMA CS 2021 survey. *BMC Women's Health*, 24(1). <https://doi.org/10.1186/s12905-024-03050-x>
- DP3AKB Kota Serang. (2023). *Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kota Serang Tahun 2023*.
- Eva, I. J., & Habib dan Md. Ahsan. (2024). Patriarchal Influence on Contraceptive Use and Reproductive Decision Making: A Study on Selected Areas in Sirajganj District. *International Journal of Science and Business*, 37(1), 119–132. <https://doi.org/10.58970/ijsb.2389>
- Jakiyah, J., & Amelda, R. (2023). Analisis Peran Gender dalam Pembagian Tugas Keluarga: Masyarakat Cipocok Kota Serang. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Non Formal*, 1, 2023. <https://ejournal.untirta.ac.id/SNPNF/article/view>

- Joseph, J., Pradeepkumar, K., & Chettyparambil Lalchand, T. (2024). Myths and Misconceptions – Unraveling the Paradox of Oral Contraceptive Pills. *International Journal of Health Sciences and Research*, 14(5), 368–375. <https://doi.org/10.52403/ijhsr.20240549>
- Meeting, H. A. (2024). *i34 40*. July, 7–8.
- Mwakisole, A. H., Lambert, V. J., Nzali, A., Aristide, C., Laizer, E., Cordeiro, A. A., Gregory, L., Mwakisole, N., Nicol, C. E. W., Paul, N., Kalluvya, S. E., Kihunrwa, A., Downs, D. J., Wamoyi, J., Downs, J. A., & Lee, M. H. (2023). Partnerships with religious leaders to promote family planning in rural Tanzania: an open-label, cluster randomised trial. *The Lancet Global Health*, 11(12), e1943–e1954. [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(23\)00453-9](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(23)00453-9)
- Okenyori, D. S., Matoke, V., Odhiambo, F., Salima, R., Anyika, D., & Ogutu, G. (2023). Social-cultural factors influencing modern contraceptive uptake among women of the reproductive age in Turkana County, Kenya. *International Journal Of Community Medicine And Public Health*, 11(1), 51–56. <https://doi.org/10.18203/2394-6040.ijcmph20234107>
- Perwakilan BKKBN Provinsi Banten. (2023). *Laporan Kinerja Perwakilan BKKBN Provinsi Banten Tahun 2023*.
- Rajkumari, B., Maisnam, A. B., Devi, O. G., & Yumnam, R. (2024). Prevalence, patterns and determinants of unmet needs of contraception among married women in Imphal East district of Manipur: a cross-sectional study. *International Journal Of Community Medicine And Public Health*, 11(9), 3600–3607. <https://doi.org/10.18203/2394-6040.ijcmph20242565>
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga*. 1, 12–42.
- Setianti, Y., Dida, S., Puspitasari, L., & Nugraha, A. R. (2017). Social Media and Reproductive Health - Communication Model of Adolescent Reproductive Health in Social Media. *KnE Social Sciences*, 2(4), 28. <https://doi.org/10.18502/kss.v2i4.864>
- Sundoro, T., Tsaqila, N., & Nuha, F. U. (2023). Peningkatan Pemahaman tentang Pentingnya Program Keluarga Berencana di Dusun Mojosari Kelurahan Wonolelo Kecamatan Pleret Bantul. *Jurnal Abdimas Kesehatan (JAK)*, 5(1), 133. <https://doi.org/10.36565/jak.v5i1.477>
- Tadesse, D., Medhin, G., Kassie, G. M., Dadi, T. L., Tigabu, S., Demissie, M., Alemayehu, M., Gerbaba, M. J., Denberu, B. F., & Teklu, A. M. (2022). Unmet need for family planning among rural married women in Ethiopia: What is the role of the health extension program in reducing unmet need? *Reproductive Health*, 19(1), 1–10. <https://doi.org/10.1186/s12978-022-01324-x>